

RELASI MEDIA MASSA DAN POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019

Riyan Alghi Fermana, Aidinil Zetra

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Jln. Limau
Manis, Kota Padang, 25232, Indonesia

E-mail:

riyanalghi98@gmail.com, aidinil@soc.unand.ac.id

Abstract

For the first time, in the history of holding General Election (Pemilu) in Indonesia, the Presidential General Election (Pilpres) was held simultaneously with the General Election for Legislative Members (Pileg). The 2019 Presidential Election was attended by two pairs of presidential and vice presidential candidates, namely the candidate pair Joko Widodo and KH. Ma'ruf Amin, as well as Prabowo Subianto and Sandiaga Uno. In determining of the leader of the winning team, the Jokowi-Ma'ruf National Campaign Team (TKN) chose Erick Thohir, owner of the Republika newspaper, as Chairman of the Jokowi-Ma'ruf TKN. This contradicts the statement made by Erick Thohir regarding the independence of his political affiliation fund so far. This study aims to explain and analyze the trend reporting in the Republika newspaper in the context of the 2019 Presidential Election. The research method used is the analysis of model framing by Robert N. Entman. The result of the research shows that with participation of mass media owner in politics, that it is certain that the mass media is disproportionate or nonindependent. Furthermore, the alignment of mass media at least can be detected through: First, mass media in determining the source of news. Secondly, by utilizing the limitations of columns and pages, the mass media will pay attention to the matters deemed as important by one or pair of candidates in General Election. Thirdly, the presence of ample space and place arrangement toward the activities of one or pair of candidates, such as news reporting in the first page of a newspaper.

Keywords: Mass Media and Politics Relations, 2019 Presidential Election, Republika.

Abstrak

Untuk pertama kalinya, dalam sejarah penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) diselenggarakan secara serentak dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg). Pilpres 2019 diikuti oleh dua pasang calon, yaitu pasangan calon Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, serta Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dalam menentukan ketua tim pemenang, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf memilih Erick Thohir, pemilik surat kabar Republika, sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf. Hal ini bertentangan dengan apa yang pernah disampaikan Erick Thohir terkait independensi dan afiliasi politiknya selama ini. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisa kecenderungan pemberitaan Republika dalam konteks Pilpres 2019. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah analisis *framing* model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan keikutsertaan pemilik media massa dalam politik, maka dapat dipastikan media massa tersebut tidak proporsional atau independen. Selanjutnya, keberpihakan media massa setidaknya dapat dideteksi melalui: Pertama, media massa dalam menentukan sumber berita. Kedua, dengan memanfaatkan keterbatasan kolom dan halaman, media massa akan memerhatikan hal yang dipandang urgen dari seseorang atau pasangan calon dalam Pemilu. Ketiga, adanya pengaturan ruang dan tempat cukup luas terhadap kegiatan seseorang atau pasangan calon, seperti pemberitaan pada halaman pertama dari sebuah surat kabar.

Kata Kunci: Relasi Media Massa dan Politik, Pemilihan Presiden 2019, Republika.

1. Pendahuluan

Dalam konteks politik modern, media massa tidak saja menjadi bagian integral dari politik, tetapi juga mempunyai posisi yang sangat sentral dalam politik (Pawito, 2015). Dengan media massa, masyarakat mengetahui segala sesuatu atau aktivitas dari para politisi, mulai ide terkait kehidupan masyarakat, pernyataan-pernyataan yang mungkin kontroversial menurut sebagian masyarakat, partai politik yang memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu), sampai munculnya para artis yang secara tiba-tiba mencalonkan diri pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Pileg).

Dalam perkembangannya, masyarakat akan semakin bergantung kepada media massa apabila situasi politik tempat tinggal masyarakat mengalami perubahan signifikan. Situasi seperti ini sering kali terjadi saat Pemilu, adanya konflik antar anggota masyarakat, konflik antar elit partai politik, sampai krisis politik akibat ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pada sisi yang lain, media massa sebenarnya memperoleh keuntungan sebab situasi politik sedemikian rupa memungkinkan media massa tidak bersusah payah mencari bahan informasi untuk dijual kepada masyarakat.

Berdasarkan identifikasi dan pemaparan di atas, peneliti sebelumnya mencoba mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu (*previous study*) yang berkaitan dengan relasi media massa dan politik, seperti penelitian “Media dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia” oleh Adiyana Slamet; penelitian “Relationship in Public Opinion and Mass Media: Formation of Public Opinion through Political Advertising in MNC and Metro TV” (Danang Trijayanto); dan penelitian “Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa” (Tabroni). Penelitian pertama, kedua, dan ketiga memperbincangkan relasi media massa dan politik dari perspektif Ilmu Komunikasi dan pendekatan interaksi-simbolik dalam menganalisa realitas di lapangan.

Pengelompokkan penelitian lain, yaitu penelitian “Interaksi Politik dan Media: Dari

Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi” dari Effendi Gazali. Penelitian Effendi Gazali memandang relasi media massa dan politik merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan. Gazali (2004) juga menggambarkan perkembangan komunikasi politik dunia dan perkembangannya di Indonesia. Peneliti menaruh penelitian Effendi Gazali berbeda dibandingkan tiga penelitian sebelumnya karena meskipun keempatnya menggunakan perspektif Ilmu Komunikasi, penelitiannya mempunyai studi kasus Indonesia yang lebih komprehensif.

Penggambaran di atas nyatanya tidak memuaskan untuk saat ini. Permasalahannya, dengan media massa mencoba profesional, memajukan idealisme, dan mengedepankan kode etik jurnalistik, media massa tetap menghadapi kesukaran. Batu pendarungan yang dihadapi oleh media massa satu diantaranya adalah budaya masyarakat dan elit secara khusus yang paternalistik (Morissan, dkk, 2017). Elit media misalnya, mampu mengontrol informasi atau berita yang dianggap menguntungkan dirinya.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, selanjutnya peneliti mempunyai kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya sebagai berikut. Pertama, peneliti mencoba menganalisa relasi media massa dan politik dari perspektif Ilmu Politik. Kedua, peneliti menapak relasi media massa dan politik dengan fokus utama surat kabar nasional di Indonesia. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada media massa elektronik. Ketiga, studi penelitian yang dimiliki oleh peneliti cukup terbaru, yaitu Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

Juga untuk pertama kalinya, dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Pilpres dan Pileg diselenggarakan secara serentak. Khusus Pilpres 2019, diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pertama, Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin, yang diusung diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai

Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo); dan kedua, pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam menentukan ketua tim pemenangan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menunjuk Erick Thohir, pemilik surat kabar *Republika*, sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf. Erick Thohir dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menjadi ketua tim sukses karena kemampuan manajerialnya (*Republika*, 8 September 2018). Sedang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memilih Djoko Santoso, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode tahun 2007-2010, sebagai Ketua BPN Prabowo-Sandi.

Ketua tim kampanye atau pemenangan sangat penting dalam dua hal, baik secara simbolis maupun fungsional (Heryanto, 2018). Secara simbolis, merupakan representasi orang yang dapat diterima atau kepercayaan kandidat yang diharapkan memberikan sentimen positif. Sementara secara fungsional, ketua tim mempunyai peran signifikan dalam manajemen pemenangan, dirigen seluruh gerak implementasi strategi, sekaligus orang yang dapat menjembatani kepentingan banyak pihak.

Dengan ditunjuknya Erick Thohir sebagai Ketua TKN, ini sangat bertentangan dengan apa yang pernah disampaikannya terkait independensi dan afiliasi politiknya ketika diwawancarai *Republika* dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) *Republika* yang kedua puluh lima sebagai berikut.

"Inti dari bisnis *Republika* adalah bagaimana kita konsisten memberikan informasi yang benar kepada umat, sehingga umat dengan informasi yang mereka dapat nantinya dapat memilih pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin di Indonesia... Kebetulan juga saya secara pribadi tidak terafiliasi dengan partai politik manapun" (*Republika*, 4 Januari 2018).

Meskipun Erick Thohir menyatakan tidak mempunyai afiliasi politik dengan partai politik manapun, dari pernyataannya tadi dapat

ditarik simpulan bahwa tidak dapat dipungkiri Erick Thohir mempunyai kepentingan politik terhadap *Republika* pada Pilpres 2019. Pada saat yang lain, *Harian Republika* menurunkan berita utama (*headline news*) yang dianggap menonjolkan salah satu pasangan calon, tepatnya pascapenunjukan Erick Thohir selaku Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti berasumsi relasi yang terjadi antara media massa dan elit politik dalam bentuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon justru menyebabkan salah satu fungsi utama media massa, yaitu kontrol sosial menjadi lemah. Erick Thohir selaku pemilik telah membawa surat kabar *Republika* sebagai media massa arus utama (*mainstream*) di Indonesia tidak dapat berperan penuh dalam mengontrol kekuasaan negara.

Lebih jauh rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah bagaimana kecenderungan-kecenderungan pemberitaan surat kabar *Republika* dalam konteks Pilpres 2019. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu dapat menjelaskan dan menganalisa pemberitaan-pemberitaan surat kabar *Republika* selama Pemilihan Presiden 2019.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

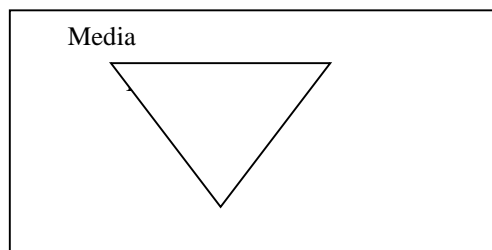
2.1. Relasi Media Massa dan Politik

Hubungan atau relasi antara media dan para politisi atau pemerintah dapat dikatakan telah berjalan cukup lama. Relasi antara media massa dan politisi terjadi tidak karena wartawan yang membutuhkan politisi atau pejabat pemerintah sebagai sumber informasi, melainkan para politisi memerlukan media untuk menyampaikan ide atau gagasan, termasuk kebijakan-kebijakan yang bakal dan telah diputuskan atas nama kepentingan masyarakat.

Meskipun ada hubungan yang saling membutuhkan antara media massa dan politik, dalam banyak situasi sering kali terjadi

ketidakharmonisan. Oleh karenanya, ada yang mengatakan bahwa hubungan antara media massa dan politik seperti “benci tetapi saling merindukan”.

Menurut Merill (Dalam Cangara, 2016: 109), permusuhan yang terjadi antara media massa dan pemerintah secara umum terjadi karena media massa menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (*watchdog*). Merill juga berpendapat, semestinya media massa bersahabat dan bekerja sama untuk kepentingan orang banyak. Adapun mengenai format relasi antara media massa dan politik, termasuk masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Pola Hubungan Kerjasama Antara Masyarakat, Media, dan Pemerintah

Dari gambar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya terdapat kerja sama di antara masyarakat, media, dan pemerintah. Terkait dengan fungsi pengawasan, tidak media massa dan masyarakat yang mempunyai tugas mengawasi pemerintah, setiap pihak mempunyai tugas yang sama saling mengawasi. Sementara terkait relasi media massa dan politik, menurut Cangara (2016), diharapkan peran media tidak sekadar memberitakan, tetapi turut berperan dalam koridor pembangunan bangsa (*national building*).

2.2. Teori Agenda Setting

Teori agenda setting pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell McCombs dan Donald L. Shaw dari *School of Journalism University of North California* melalui artikelnya yang berjudul “The Agenda Setting Function of the Mass Media” pada tahun 1973 (Cangara, 2016). McCombs dan Shaw tertarik mengkaji pendapat para pemilih mengenai isu-

isu yang dipandang sangat urgen dari masifnya pemberitaan media massa saat itu. Hasil penelitian kelak menunjukkan adanya korelasi signifikan antara isu yang diangkat oleh media massa dengan isu yang dipandang penting oleh pemilih.

Secara umum, agenda setting merupakan proses linear yang terdiri atas tiga tahapan utama (Morissan, dkk, 2017). Pertama, tahapan agenda media (*media agenda*), penentuan prioritas isu oleh media massa. Kedua, tahapan agenda public (*public agenda*) di mana media agenda dalam cara tertentu mempengaruhi ataupun berinteraksi dengan pemikiran publik. Ketiga, tahapan agenda kebijakan (*policy agenda*) di mana agenda publik berinteraksi sedemikian rupa dengan penilaian penting dari para pemangku kebijakan, sehingga menghasilkan agenda kebijakan.

Dalam konteks politik, partai politik dan aktor politik akan berusaha mempengaruhi agenda media untuk mengarahkan pendapat umum melalui pembentukan citra (Cangara, 2016). Dengan menonjolkan isu, citra, serta karakteristik seseorang, media massa dapat memberikan sumbangan signifikan mengkonstruksikan persepsi publik dalam proses pengambilan keputusan, apakah turut serta dalam pemilihan dan siapa kandidat yang akan dipilih.

Di Indonesia, beberapa surat kabar mempunyai kelebihan dalam mengetengahkan isu-isu tertentu melalui, tajuk rencana, berita utama, artikel khusus yang berkaitan dengan isu tertentu, sampai berita hasil wawancara. Dalam penelitiannya, peneliti berfokus pada agenda setting berita utama Republika yang terkait dengan Pilpres 2019, dimulai dari penetapan Erick Thohir sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf pada 8 September 2018 sampai hari terakhir masa kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden pada 13 April 2019.

2.3. Framing

Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya dalam menganalisa teks pemberitaan (Sobur, 2015). Tamburaka (2013) menyatakan, *framing* dalam agenda setting dapat dilihat dari dua perspektif. Perspektif pertama, yaitu perspektif situasional di mana dalam situasi tertentu *framing* dan agenda setting membutuhkan perhatian luas dari masyarakat. Sedangkan perspektif kedua, yaitu perspektif kontekstual berlaku pada isu-isu atau konteks masalah tertentu saja.

Dalam hal pemilihan kata, sekalipun media massa bersifat melaporkan, akan tetapi telah menjadi sifat dari pembicaraan politik untuk memperhitungkan simbol politik (Sobur, 2015). Para komunikator akan bertukar citra atau makna melalui lambang atau simbol. Para komunikator juga saling menginterpretasikan pesan-pesan tersebut. Dalam konteks di atas, meskipun media massa melakukan pengutipan langsung (*direct quotation*) atau menetapkan seseorang sebagai sumber berita, sebenarnya media massa terlibat dalam pemilihan simbol politik.

Kemudian dalam hal melakukan pbingkaian berita politik misalnya, media massa mempunyai sebab adanya tuntutan teknis, seperti keterbatasan kolom dan halaman atau waktu (Sobur, 2015). Peristiwa yang panjang, lebar, dan rumit akan “disederhanakan” melalui *framing* fakta-fakta sehingga layak untuk dipublikasikan.

Berkaitan dengan kepentingan pemberitaan, komunikator sering kali menyoroti hal-hal penting dari sebuah peristiwa politik. Pada bagian penting, maka mulai terlihat ke mana arah pembentukan suatu berita. Terakhir, terkait ruang dan waktu, pemberitaan, suatu peristiwa akan memperoleh perhatian besar dari masyarakat apabila media massa memberikan tempat. Semakin besar ruang yang diberikan, maka akan semakin besar perhatian yang diberikan oleh masyarakat.

3. Objek dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu social yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, dan perbuatan-perbuatan manusia, serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif (Afrizal, 2016). Sedangkan data yang dimaksud di dalam penelitian adalah seluruh berita utama surat kabar Republika selama Pilpres 2019.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis *framing* model Robert N. Entman. *Framing* menurut Entman (Dalam Eriyanto, 2015) pada berita dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu pertama, identifikasi masalah (*problem identification*); kedua, identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*); ketiga, evaluasi moral (*moral evaluation*); dan keempat, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*).

Selanjutnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan proses mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta pembuktian suatu peristiwa (Satori & Komariah, 2012).

Sementara objek penelitian pada kesempatan ini adalah surat kabar Republika. Pemilihan objek sekaligus lokasi oleh peneliti karena Republika mempunyai kekhasan tersendiri dibandingkan dengan media massa lainnya. Pertama, Republika merupakan surat kabar dengan segmen utama komunitas Muslim di Indonesia. Kedua, diantara sekian banyak media massa, khususnya media massa dengan segmen komunitas Muslim di Indonesia, Republika merupakan surat kabar yang mampu bertahan dalam waktu cukup lama.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan dan menganalisa hasil analisis *framing* terhadap setiap pemberitaan utama Republika terhitung sejak 8 September 2018 sampai dengan hari terakhir masa kampanye pasangan calon presiden peserta Pilpres 2019 pada 13 April 2019.

4.1. Berita Utama Surat Kabar Republika 8 September 2018

Dimulai pada 8 September 2018, Republika menurunkan berita dengan tajuk “Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial”. Berita utama “Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial” terdiri atas dua puluh lima paragraf dan bersambung pada halaman sembilan.

Problem Identification. Surat kabar Republika memulai pemberitaan ditunjuknya Erick Thohir sebagai Ketua TKN pada 7 September 2018 dengan menyampaikan inti pemberitaannya secara langsung pada paragraf pertamanya.

“JAKARTA – Bakal calon presiden pejawat Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk pengusaha Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangannya... Erick dinilai sebagai sosok yang tepat untuk menjadi ketua tim sukses karena kemampuan manajerialnya (pf. 1).”

Dari kutipan di atas, dapat diidentifikasi Republika ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya pembaca Repulika bahwa calon presiden Joko Widodo telah memilih Erick Thohir, seorang pengusaha sekaligus pemilik media, sebagai ketua tim pemenangannya pada Pilpres 2019. Menurut Joko Widodo, Erick Thohir merupakan sosok yang tepat sebagai ketua tim pemenangan karena mempunyai kemampuna manajerial.

Causal Interpretation. Dalam berita utama “Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial”, aktor utama dalam pemberitaan adalah Joko Widodo. Sedang faktor penyebab pemberitaan, dalam hal ini penyebab calon

presiden Joko Widodo menunjuk Erick Thohir dipaparkan sebagai berikut.

“Jokowi mengatakan, Erick merupakan sosok pemimpin yang terbukti kemampuannya... mampu membuat perhelatan Asian Games 2018 berjalan sukses dan menuai pujian dari kalangan nasional dan internasional (pf. 3).”

“Menurut Jokowi, masyarakat sudah mengenal sosok Erick. Erick, kata Jokowi merupakan pengusaha sukses, pemilik media, klub sepak bola, dan klub basket... (pf. 4).”

“Jokowi mengaku sengaja memilih ketua tim sukses yang bukan berasal dari partai politik... hal terpenting yang harus dimiliki ketua timses adalah keahlian dalam manajemen dan mengelola tim (pf. 5).”

Dari tiga paragraf di atas dapat diidentifikasi pula tiga faktor pendorong pasangan calon Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin memilih Erick Thohir, pertama, Erick Thohir ialah pemimpin yang telah teruji kemampuannya; kedua, Erick Thohir merupakan pengusaha yang sukses, pemilik media, klub sepak bola, dan basket; serta ketiga, tidak dari partai politik dengan memperhatikan kemampuan dalam mengelola organisasi.

Moral Evaluation. Erick Thohir, selaku Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf yang juga pemilik Republika dalam pernyataannya menerima permintaan sebagai ketua tim sukses pasangan calon Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin sebagai berikut.

“Erick menerima tawaran menjadi ketua timses karena melihat besarnya tekad Jokowi untuk membangun Indonesia. “Itu jadi pilihan saya,” kata Erick Thohir... (pf.7).”

Erick Thohir menyatakan, alasannya menerima permintaan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin karena melihat Joko Widodo mempunyai iktikad yang besar dalam membangun Indonesia. Di samping Erick Thohir menyatakan mendukung Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin merupakan pilihan pribadinya.

Treatment Recommendation. Sebagai penutup dari pemberitaan penunjukan Erick Thohir sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf,

Republika mengutip pendapat Rico Marbun, Direktur Eksekutif Median sebagai berikut.

“Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun menilai, langkah kubu Jokowi-Ma’ruf memilih Erick Thohir sebagai ketua timses dan Jusuf Kalla sebagai ketua dewan penasihat merupakan strategi meraih suara dari berbagai lapisan masyarakat (pf. 14).”

Dapat ditarik kesimpulan pasangan calon Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin cukup beruntung dalam penyusunan komposisi tim pemenang sebab Erick Thohir dan Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), merupakan maneuver tim pemenang dalam meraih elektoral dari masyarakat. Apalagi Erick Thohir dan Jusuf Kalla sama-sama pengusaha, sehingga diharapkan puka mendapatkan dukungan dari kelompok pengusaha.

4.2. Berita Utama Surat Kabar Republiak 23 September 2018

Pada 23 September 2018, Republika menampilkan berita utama dengan judul “Kampanye Dimulai”. Berita utama “Kampanye Dimulai” terdiri atas empat belas paragraf dan terdapat pada halaman pertama Republika.

Problem Identification. Republika memulai pemberitaannya memaklumkan tahapan masa kampanye Pemilu 2019 telah resmi dimulai seperti berikut.

“JAKARTA – Kampanye Pemilu 2019 resmi dimulai pada Ahad (23/9) ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghimbau peserta pemilu dan masyarakat sama-sama menjaga ketertiban selama masa kampanye (pf. 1).”

Mengutip pernyataan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, Republika menyatakan masa kampanye Pemilu 2019 resmi dimulai pada 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Pada beritanya, Republika menyampaikan himbauan dari KPU kepada para peserta Pemilu dan masyarakat agar sama-sama menjaga ketertiban selama masa kampanye Pemilu.

Causal Interpretation. Dalam pemberitaannya, Republika menyampaikan

hal-hal yang berkaitan dengan masa kampanye Pemilu 2019. Adapun informasi yang disampaikan Republika adalah sebagai berikut.

“... masa kampanye Pemilu 2019 berlangsung selama tujuh bulan. KPU meminta kepada semua peserta pemilu dan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan masa kampanye ini (pf. 3).”

“Peserta kampanye Pemilu 2019 adalah dua pasangan capres-cawapres Pemilu 2019, para caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan calon anggota DPD. Selama masa kampanye, para peserta boleh melakukan berbagai jenis kegiatan kampanye, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka... dan kampanye media sosial (pf. 5).”

Masa kampanye, seperti dalam laporan Republika, berlangsung selama tujuh bulan. Para peserta kampanye Pemilu 2019 meliputi dua pasang calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Selain itu, kegiatan kampanye yang diatur dalam Pemilu 2019 diantaranya pertemuan terbatas, tatap muka, dan kampanye dengan melalui media sosial.

Moral Evaluation. Berkaitan dengan telah dimulainya masa tahapan kampanye Pemilu, pihak TKN Jokowi-Ma’ruf menyampaikan pandangannya sebagai berikut.

“... Erick Thohir mengatakan, pemilu bukan ajang perseteruan... Lebih dari itu, pemilu perlu dimaknai sebagai perayaan proses demokrasi untuk memperjuangkan visi, gagasan, ide, dan program menuju Indonesia maju (pf. 10).”

“Mari kita sambut pesta demokrasi Indonesia dan mari kita dukung terus Jokowi-Ma’ruf #IndonesiaMaju, kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Sabtu (pf. 11).”

Erick Thohir berpendapat, Pemilu dapat diartikan sebagai bagian dari merayakan demokrasi. Lebih jauh bagian dari merayakan demokrasi, yaitu dengan saling beradu ide, gagasan, dan program demi kemajuan Indonesia. Pada proses *framing*, para pihak yang terlibat dalam penyuntingan berita tidak media massa semata (Sobur, 2015). Akan tetapi, para pihak yang mempunyai kepentingan. Secara tidak langsung, tindakan di aras dilakukan oleh Republika dengan keterangan tertulisnya.

Treatment Recommendation. Republika pada akhir berita utamanya mencoba mengemukakan pernyataan Andre Rosiade, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi terkait dengan dimulainya masa kampanye Pemilu.

“Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade memastikan tim kampanyenya dengan tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin telah sepakat untuk menciptakan pemilu yang damai dan sejuk... (pf. 13).”

“Saya menangkap akan ada pertemuan rutin tim Prabowo dan Pak Jokowi untuk berkoordinasi penyelesaian masalah di lapangan yang terjadi, ujar Andre... (pf.14).”

Dari paragraf di atas disampaikan BPN Prabowo-Sandi telah mencapai kesepakatan dengan TKN Jokowi-Ma’ruf membuat suasana Pemilu yang damai. Bahkan, Andre Rosiade menyatakan, tidak menutup kemungkinan ada pertemuan rutin antara dua tim pemenang selama Pemilu. Pertemuan tersebut bertujuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

4.3. Berita Utama Surat Kabar Republika 24 September 2018

Berikutnya, pada 24 September 2018, Republika menurunkan berita utama “Ikrar Damai”. Berita “Ikrar Damai” sendiri terdiri atas sebelas paragraf, satu gambar kegiatan, dan letak berita pada halaman pertama.

Problem Identification. Sebagaimana yang diberitakan Republika, seluruh peserta Pemilu, termasuk dua pasang calon presiden bersama dengan seluruh partai politik peserta Pemilu menyongsong deklarasi damai sebagai berikut.

“JAKARTA – Seluruh peserta Pemilu 2019 pada Ahad (23/9) mengikrarkan janji damai dalam berkampanye... di Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Ada tiga hal penting dalam deklarasi yang diikrarkan... (pf. 1).”

“Kami, partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 beserta tim kampanye dan para pendukung, berjanji: Satu, mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil... (pf. 2).”

“... Dua, melaksanakan kampanye yang aman, tertib, berintegritas, tanpa hoaks... “Tiga, melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku... (pf. 3).”

Dalam deklarasi damai, para peserta Pemilu melakukan ikrar secara bersama-sama. Terdapat tiga hal penting yang diikrarkan oleh para peserta Pemilu, yaitu mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), melaksanakan kampanye yang aman, tertib, berintegritas, tanpa hoaks, dan melakukan kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Causal Interpretation. Para aktor dalam berita kali ini, yaitu Arief Budiman, Ketua KPU, Wahyu Setiawan (Komisioner KPU), dua kandidat calon presiden dan wakil presiden, KH. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), dan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

“Setelah pembacaan ikrar kampanye damai, seluruh peserta menandatangani deklarasi damai. Penandatanganan dilakukan oleh kedua pasangan calon... Peserta kemudian secara simbolis melepaskan burung merpati (pf. 4).”

“... Sebelumnya deklarasi damai, dilakukan pembacaan doa oleh Imam Masjid Istiqlal KH. Nasaruddin Umar. Acara ditutup dengan menyanyikan jingle Pemilu yang dibawakan oleh penyanyi Kikan (pf. 10).”

Sebelum kegiatan dimulai, para peserta mengikuti doa bersama yang dipimpin oleh KH. Nasaruddin Umar. Selesai mengikrarkan kampanye damai, para peserta melakukan penandatanganan naskah kampanye damai. Sebagai penutup kegiatan, para peserta melepaskan burung merpati diiringi lagu Pemilu.

Moral Evaluation. Ada hal menarik dalam kegiatan kampanye damai di mana seluruh peserta deklarasi damai mengenakan pakaian adat. Meskipun, dalam gambar juga terdapat beberapa peserta mengenakan pakaian batik.

“Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Bali dengan sepatu selop, sementara Kiai Ma’ruf Amin mengenakan kemeja dan jas dengan sarung yang melingkar di pinggangnya. Mereka berjalan sambil mengacungkan jari telunjuk penanda angka 1, nomor urut Jokowi-Ma’ruf... sedangkan Kiai Ma’ruf mengacungkan tangannya sambil sesekali bergoyang ditemani Erick Thohir (pf. 7).”

“... Dengan kemeja krem khas Jawa, Prabowo mengenakan blangkon sebagai penutup kepala, sementara Sandiaga memakai peci berwarna hitam... (pf. 10).”

Pada deklarasi tersebut, calon presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Bali. Sementara calon wakil presiden KH. Ma'ruf Amin, dengan setelan kemeja, jas, dan sarung yang melingkar dalam pinggang, peneliti mengidentifikasi sebagai pakaian adat Banten. Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto, mengenakan pakaian adat Jawa. Sandiaga Uno, pendamping Prabowo Subianto, mengenakan pakaian adat Melayu.

Kembali merujuk konsep analisis *framing*, analisis *framing* mempunyai fungsi mencermati seleksi, penonjolan, atau pertautan fakta suatu berita agar mempunyai makna lebih menarik dan mudah diingat (Sobur, 2015). Dengan memanfaatkan keterbatasan halaman dan kolom, media massa mencoba menyederhanakan peristiwa yang panjang agar layak diterbitkan. Pada paragraf ketujuh, Republika mencoba menyampaikan Erick Thohir, pemilik Harian Republika, hadir dalam kegiatan tersebut. Pada hal ini membuktikan setidaknya dari hal yang dipandang urgen terlihat arah pembentukan berita Republika.

Treatment Recommendation. Dalam berita "Ikrar Damai", Republika menawarkan pendapat Ketua MPR Zulkifli Hasan terkait telah terselenggaranya deklarasi kampanye damai sebagai berikut.

"Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan seluruh relawan maupun pendukung antarcalon presiden maupun partai politik tetap saling menyapa ketika bertemu... "Saling sapa, *kan* teman sendiri... (pf. 11)."

Dalam pandangan Zulkifli Hasan, dengan adanya deklarasi kampanye damai, diharapkan para pendukung dan simpatisan antar calon presiden dan partai politik tetap menjalin silaturahmi, di antara para pendukung, tidak menutup kemungkinan merupakan teman, tetangga, atau anggota keluarga sendiri.

4.4. Berita Utama Surat Kabar Republika 20 Oktober 2018

Pada bulan Oktober, tepatnya pada 20 Oktober 2018, Republika menurunkan berita utama "Indonesia Sumbang Muslim

Berpengaruh". Indonesia menyumbangkan dalam daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh di dunia, di mana salah satu nama adalah calon presiden Joko Widodo.

Problem Identification. Republika menyatakan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RSISC) telah merilis daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh di dunia sebagai berikut.

"AMMAN – Pusat Studi Strategis Islami Kerajaan Yordania memasukkan nama sejumlah tokoh Islam dari Indonesia ke dalam 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia... (pf. 1)."

"... Pusat Studi Strategis Islami Kerajaan Yordania (RSISC) yang diklaim sebagai institusi riset independen... institusi internasional Islam yang tak terikat dengan negara manapun, meski bermarkas di Amman, Yordania (pf. 3)."

Dari dua paragraf di atas diterangkan RSISC, sebuah lembaga penelitian independen yang berpusat di Amman, Yordania, telah merilis daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh di dunia.

Causal Interpretation. RSISC dalam menentukan standar seseorang tokoh Muslim mempunyai pengaruh diterangkan Republika sebagai berikut.

"Tolak ukur pengaruh para tokoh itu dinilai dari siapa pun yang memiliki kekuasaan, baik secara budaya, ideologi, keuangan, maupun politik, untuk membuat perubahan dan memberikan dampak signifikan bagi dunia Islam (pf. 4)."

RSISC dalam menentukan standar tokoh Muslim berpengaruh di dunia menggunakan tiga standar utama. Pertama, tokoh Muslim, terlepas dari latar belakang apapun; kedua, dengan kekuasaan yang dipunyai tokoh tersebut, mampu menciptakan perubahan; dan ketiga, terdapat dampak signifikan untuk dunia Islam.

"Dalam daftar itu, Presiden Joko Widodo serta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj dan Habib Luthfi bin Yahya masuk dalam 50 tokoh Muslim 2019 berpengaruh di dunia. Joko Widodo berada di posisi-16, sementara Said Aqil Siraj di posisi ke-20 (pf. 6)."

Dari daftar lima ratus tokoh, RSISC menempatkan Presiden Joko Widodo pada peringkat keenam belas. Tokoh Muslim

Indonesia lainnya, yaitu KH. Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU periode tahun 2010-2020, pada peringkat kedua puluh. Sementara Habib Luthfi bin Yahya berada pada peringkat ketiga puluh tujuh (Al-Khrais, dkk, 2019).

Moral Evaluation. Dalam berita Republika, masuknya nama calon presiden pejabat dalam daftar lima ratus Muslim dipandang dengan beberapa pendapat.

“Tokoh Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menilai daftar yang disusun RSISC sedianya memiliki maksud baik. Kendati demikian, menurut dia, patokan keberpengaruhannya yang mereka pakai tidak dilihat secara substantif... (pf. 10).”

“Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, tokoh yang dianggap berpengaruh harus dapat dijadikan tolak ukur dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara (pf. 11).”

Din Syamsuddin, dari Muhammadiyah berpandangan, daftar rilis RSISC mempunyai maksud baik dengan catatan tidak memperhatikannya secara substantif saja. Sedang Amirsyah Tambunan, Wakil Sekretaris Jenderal MUI berpendapat, tokoh Muslim Indonesia yang terdapat dalam daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh dapat dijadikan sebagai ukuran dalam mengambil kebijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk kesekian kalinya, peneliti menemukan ketidaksesuaian dari pemberitaan Republika. Dalam berita “Indonesia Sumbang Muslim Berpengaruh”, seluruh narasumber memberikan pandangannya bersinggungan dengan daftar RSISC, utamanya calon presiden Joko Widodo. Kenyataannya, Prabowo Subianto sebenarnya ada dalam daftar tersebut. Meskipun Prabowo Subianto tergabung dalam kategori tokoh Muslim sangat populer di media sosial.

Proses *framing* merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyuntingan berita (Tamburaka, 2013). G.J. Aditjondro (Dalam Sobur, 2015) menyatakan salah satu proses *framing* ialah reporter berhak menentukan orang yang akan diwawancarai. Pada berita ini, Republika terlihat tidak memberikan ruang sama sekali terhadap keterpilihan dua calon

presiden dalam daftar lima ratus tokoh Muslim berpengaruh secara berimbang.

Treatment Recommendation. Republika dalam menutup berita utama mengutip pernyataan dari Maman Imanulhaq, Ketua Lembaga Dakwah PBNU.

“... Ketua Lembaga Dakwah PBNU Maman Imanulhaq memandang Jokowi sudah membuktikan implementasi nilai Islam, diantaranya kejujuran, kesantunan, dan transparansi... (pf. 13).”

Maman Imanulhaq menyampaikan, tidak diragukan kembali keislaman dari calon presiden Joko Widodo. Dengan terpilihnya Joko Widodo, membuktikan dirinya dalam mengambil keputusan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam. Merujuk Sobur (2015), dalam hal pemilihan kata, media massa mempunyai sifat memperhitungkan simbol politik. Salah satu cara yang dilakukan media dalam memperhitungkan simbol politik adalah menetapkan narasumber, NU sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendamping calon presiden Joko Widodo, yaitu KH. Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

4.5. Berita Utama Surat Kabar Republika 10 Januari 2019

Pada 10 Januari 2019, Republika melansir berita utama “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham”. Berita utama “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham” terdiri atas satu gambar, tiga belas paragraf, serta bersambung pada halaman sembilan.

Problem Identification. Dalam berita “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham”, Republika menginformasikan terlebih dahulu berkenaan dirawatnya Ustaz Arifin Ilham sebagai berikut.

“JAKARTA – Doa untuk kesembuhan Ustaz Arifin Ilham terus mengalir dari berbagai kalangan. Para tokoh pun secara bergantian membesuk Pimpinan Majelis Zikri Az-Zikra... (pf. 1).”

Pada kalimat pertamanya, Republika ingin menggerakkan hati masyarakat agar mendoakan kesembuhan Ustaz Arifin Ilham sama halnya mengalirnya kunjungan para tokoh yang membesuknya. Pada paragraf selanjutnya, Republika mengabarkan

kunjungan dua calon presiden peserta Pilpres 2019 sebagai berikut.

“Kemarin, Ustaz Arifin Ilham dijenguk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi tiba di RSCM pukul 08.05 WIB, sedangkan Prabowo datang membesuk pukul 16.30 WIB (pf. 2).”

Pada paragraf kedua, terdapat kerancuan dari pemberitaan *Republika*. Dalam penyebutan posisi atau jabatan, Joko Widodo disebutkan sebagai Presiden RI. Sementara Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Hal ini kontradiktif dengan keterangan pada gambar berita utama yang menyatakan keduanya sebagai calon presiden. Dengan kata lain, terdapat informasi yang hendak disodorkan *Republika*, yaitu jabatan presiden calon petahana Joko Widodo.

Causal Interpretation. Pada pemberitaan “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham”, *Republika* mendeskripsikan kunjungan dua calon presiden seperti di bawah ini.

“Setibanya di lokasi, Jokowi langsung menuju ruang perawatan Ustaz Arifin tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Begitu pula saat ia meninggalkan lokasi. Ia bergegas ke Istana Negara untuk melantik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang baru (pf. 3).”

“Kita semua... mendoakan agar beliau cepat sembuh dan penyakitnya diangkat oleh Allah SWT dan berkegiatan kembali, berdakwah... kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara... (pf. 4).”

Republika menceritakan kehadiran Joko Widodo yang tampak terburu-buru. Setelah Presiden Joko Widodo tiba pun, Joko Widodo pun langsung memasuki ruang perawatan Ustaz Arifin Ilham tanpa memberikan pernyataan kepada wartawan. Kendati demikian, Joko Widodo baru menyampaikan pernyataannya di Istana Negara. Adapun calon Prabowo Subianto sebagaimana diberitakan *Republika* sebagai berikut.

“Prabowo juga membagikan foto dirinya melalui akun Twitter saat menjenguk Ustaz Arifin. Prabowo tampak menggunkan pakaian khasnya, baju safari cokelat... (pf. 6).”

Dalam pemberitaannya, *Republika* tidak menerangkan secara spesifik kunjungan calon

presiden Prabowo Subianto. Tambahkan pula *Republika* justru mendeskripsikan kunjungan Prabowo Subianto dengan mengutip akun *Twitter* Prabowo Subianto sendiri. Sedangkan pada paragraf sebelumnya, *Republika* dapat memberikan informasi dengan jelas jam kunjungan Prabowo Subianto.

Moral Evaluation. Secara umum, *Republika* memberitakan penghargaan bertalian dengan hadirnya para tokoh, termasuk dua calon presiden sebagai berikut.

“Ustaz Muslih dari Majelis Zikir Az-Zikri yang terus menemani Ustaz Arifin mengatakan, kondisi Ustaz Arifin berangsur membaik. Ustaz Arifin sering melemparkan senyum kepada para tokoh... (pf. 8).”

“Beliau tetap menerima tamu, meski kita batasi demi kesehatan... semoga terus membaik dan terus melempar senyum,” ujar Ustaz Muslih saat dihubungi (pf. 9).”

Kendatipun Ustaz Muslih menyatakan, membatasi kunjungan para tokoh dengan tujuan kesehatan dan mempercepat pemulihan Ustaz Arifin Ilham. Pada satu sisi, Ustaz Muslih juga menyebutkan Ustaz Arifin Ilham acap kali senyum kepada para tokoh yang membesuknya di rumah sakit.

Treatment Recommendation. Dalam berita utama “Doa untuk Ustaz Arifin Ilham”, *Republika* dalam memaknakan kehadiran para tokoh serta dirawatnya Ustaz Arifin Ilham di pembaringan rumah sakit sebagai berikut.

“Dia mengatakan, selain Jokowi dan Prabowo, banyak tokoh lainnya yang menjenguk Ustaz Arifin, di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan Ketua KPK Abraham Samad, hingga para ulama. Dia berharap umat terus mendoakan Ustaz Arifin agar segera diangkat penyakitnya... (pf. 10).”

Banyak tokoh nasional yang datang membesuk Ustaz Arifin Ilham, antara lain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, sampai dengan para ulama. Dalam pernyataannya, Ustaz Muslih mengutarakan harapan agar umat Islam terus menerus mendoakan kesembuhan Ustaz Arifin Ilham.

4.6. Berita Utama Surat Kabar Republika 17 Februari 2019

Pada bulan Februari, tepatnya pada 17 Februari 2019, Republika menyiarkan berita utama dengan tajuk “Jokowi Cerita Kinerja, Prabowo Swasembada”. Berita “Jokowi Cerita Kinerja, Prabowo Swasembada” terdiri atas enam belas paragraf dan didudukkan pada halaman pertama Republika.

Problem Identification. Pada aspek ini, Republika menyampaikan dahulu perhelatan yang akan diselenggarakan oleh KPU sebagai berikut.

“JAKARTA – Debat pemilihan presiden putaran kedua akan digelar mala mini. Dalam debat itu, analisis masing-masing capres di sektor energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur akan diuji (pf. 1).”

Republika melansir perhelatan yang akan diselenggarakan KPU, yaitu debat publik putaran kedua yang hanya diikuti para calon presiden peserta Pilpres 2019. Tajuk yang diperdebatkan dalam debat diantaranya, energi, pangan, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Causal Interpretation. Terkait persiapan para calon, Republika mengabarkan persiapan dari tiap-tiap calon presiden menghadapi debat seperti berikut.

“Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap menghadapi debat putaran kedua itu. Dia mengaku akan menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukannya dalam kapasitasnya sebagai presiden... (pf. 2).”

Joko Widodo dalam mempersiapkan diri mengaku tidak mempunyai permasalahan. Maksudnya adalah sebagai petahana, Joko Widodo akan menyampaikan kinerja pemerintah yang dipimpinnya selama empat tahun terakhir. Lebih jauh KH. Ma'ruf Amin, pendamping Joko Widodo sebagai berikut.

“Selain sudah berpengalaman, menurut dia, Jokowi juga menguasai tema... Dia sudah [punya] pengalaman, ucap Kiai Ma'ruf (pf.5).”

Kebalikannya, Prabowo Subianto seperti disampaikan oleh Andre Rosiade, lebih menekankan pada visi-misinya dalam bidang

swasembada energi dan pangan. Pada sektor energi, Prabowo Subianto membuat Indonesia sebagai produsen biodiesel dunia dan revitalisasi hutan. Pada sektor pangan lebih mendorong pertanian serta sektor infrastruktur berfokus pada perencanaan yang matang dan mandiri.

“... Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade, menjelaskan, Prabowo telah menguasai seluruh materi terkait dengan topik debat... (pf. 7).”

“Prabowo juga akan menyampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menjadikan Indonesia produsen biodiesel dunia. Di sisi lain, dia juga melakukan kebijakan revitalisasi 88 juta-90 juta hectare hutan rusul (pf. 9).”

“Sementara, mengenai infrastruktur... intinya ada dua hal. Pertama, perencanaan yang matang... Kedua, bagaimana pembangunan infrastruktur tidak membebani APBN atau menambah utang (pf. 13).”

Sebagaimana yang disampaikan oleh G.J. Aditjondro (Dalam Sobur, 2015), *framing* melibatkan pula pihak-pihak yang mempunyai singgungan dengan isu tertentu. Pada pasangan calon presiden nomor urut satu, Republika dapat memilih dua narasumber sekaligus, yaitu Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Sedangkan untuk pasangan calon presiden nomor urut dua, Republika sekadar memilih Andre Rosiade, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi.

Moral Evaluation. Dalam berita utama “Jokowi Cerita Kinerja, Prabowo Swasembada”. Republika menyebutkan pandangan dari KPU sebagai pihak penyelenggara debat kedua sebagai berikut.

“... Kepala Biro Teknis dan Humas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nus Syarifah mengatakan, panggung untuk debat capres sudah disiapkan. Semua peralatan pun sudah terpasang di panggung... (pf. 14).”

“Dalam debat... panitia berupaya mendorong peserta debat tidak hanya berdiri di belakang podium... Capres bisa duduk, berdiri, atau berjalan ke tengah... (pf. 15).”

Pada penyelenggaraan debat putaran kedua, KPU menjelaskan panggung debat telah disiapkan dengan baik. Dalam debat, KPU mendorong para calon presiden tidak berdiri di belakang podium. Pada debat putaran

pertama, masyarakat melihat debat publik sangat kaku dan membosankan. Oleh karenanya, panitia menyarankan para calon dapat melakukan duduk, berdiri, atau berjalan ke tengah panggung.

Treatment Recommendation. Sebagai penutup, Republika menyampaikan format penyelenggaraan debat kedua dengan peserta para calon presiden sebagai berikut.

“KPU membagi debat ke dalam lima segmen. Segmen pertama adalah pemaparan visi-misi. Segmen kedua dan ketiga adalah pertanyaan panelis... Kelima yaitu masing-masing kandidat bertanya kepada kandidat lain... (pf. 16).”

Dalam laporan pemberitaan Republika, KPU menginginkan debat putaran kedua lebih menarik dibanding debat sebelumnya. Dengan demikian, KPU melakukan beberapa perubahan, salah satunya adalah format debat. Dengan adanya perubahan format debat, diharapkan debat para kandidat dapat lebih santai dan eksploratif dalam menyampaikan visi dan misinya.

4.7. Berita Utama Surat Kabar Republika 20 Maret 2019

Setelah hampir satu bulan tidak menurunkan berita utama terkait Pilpres 2019, Republika menurunkan berita utama terkait penyelenggaraan Pilpres 2019. Berita utama Republika dengan judul “Capres Siap Hadapi Debat Keempat” mewartakan persiapan para calon presiden menghadapi debat keempat atau terakhir. Laporan utama persiapan para calon tersebut terdiri atas sebelas paragraf dan terdapat

Problem Identification. Dalam berita utamanya, Republika memulai wartanya berkenaan dengan persiapan para calon presiden menghadapi debat sebagai berikut.

“JAKARTA – Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto akan berhadap-hadapan dalam debat keempat... Tiap-tiap kubu menyatakan kesiapannya (pf. 1).”

Para calon presiden, dalam hal ini Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan berhadapan kembali pada debat putaran

keempat. Sebelumnya, Joko Widodo dan Prabowo Subianto telah berhadap-hadapan pada debat putaran kedua pada 17 Februari 2019. Dalam pemberitaan Republika disampaikan masing-masing kandidat siap bertanding dalam debat.

Causal Interpretation. Merujuk judul dari berita Republika, dua calon presiden tengah melakukan persiapan dalam menghadapi debat putaran keempat. Persiapan para calon presiden sebagaimana dilansir oleh Republika sebagai berikut.

“Jokowi sebagai capres pejawat mengatakan, ia tak melakukan persiapan khusus... “*Enggaklah*, dulu awal itu *aja* dengan Kiai Ma’ruf kita melakukan simulasi biasa aja,” ujar Jokowi... (pf. 2).”

“Meski begitu, ia mengklaim telah siap menghadapi debat nanti. Ia juga menyebut akan mempersiapkan data yang valid apabila dibutuhkan dalam debat (pf. 3).”

Dari penuturan calon presiden Joko Widodo, dirinya mengatakan tidak melakukan persiapan khusus menjelang debat putaran keempat. Meskipun demikian, Joko Widodo akan mempersiapkan data-data yang valid dalam silang pendapat nanti. Pada paragraf selanjutnya, tepatnya paragraf keempat, Joko Widodo menyatakan kegiatannya sebagai berikut.

“Sehari menjelang debat, Jokowi tidak melakukan kampanye terbuka dan memilih berada di Istana Kepresidenan Bogor guna menyelesaikan berbagai hal administratif... Mulai dari pagi tadi urusannya itu, katanya (pf. 4).”

Tidak dapat dihindari dengan menerangkan skedul kegiatan calon petahana Joko Widodo, disertai dengan pengutipan langsung (*direct quotation*) pernyataan Joko Widodo, Republika terlibat dalam pemilihan simbol politik. Dari liputan Republika disampaikan, Joko Widodo selaku presiden tetap bekerja menyelesaikan urusan-urusan administratif pemerintahan. Dengan demikian, pemberitaan Republika pada fragmen ini menjadi multitafsir, sehingga dapat diinterpretasikan dan dimaknai banyak pemahaman.

Moral Evaluation. Dalam debat yang hanya diikuti oleh para calon presiden di atas, Republika mengemukakan pendapat dari tiap tim pemenangan calon presiden, dalam hal ini TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandi sebagai berikut.

“Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) pendamping Jokowi, KH. Ma'ruf Amin, menilai pasangannya lebih berpengalaman dibandingkan Prabowo Subianto dalam hal strategi keamanan nasional... Jokowi sudah berpengalaman di posisi lebih tinggi mengurus keamanan nasional (pf. 5).”

KH. Ma'ruf Amin, sebagai pendamping Joko Widodo menerangkan, Joko Widodo tidak kalah dibandingkan dengan Prabowo Subianto. Dapat diperkirakan fundamen berpendapat KH. Ma'ruf Amin mengacu Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 10 yang menyatakan presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi tiga mata, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Juga Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 12 yang menyebutkan presiden adalah panglima tertinggi atas angkatan perang Republik Indonesia.

“Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said, juga optimistis Prabowo bakal unggul dalam tema debat... Sudirman meyakini, modal pendalaman isu tersebut bakal membuat Prabowo mendominasi jalannya debat (pf. 9).

“Sudirman mengatakan, Prabowo berkomitmen dalam terbentuknya pemerintahan yang bersih bila terpilih dalam Pilpres... (pf. 10).”

Sudirman Said, Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi yakin terhadap kesiapan Prabowo Subianto. Dengan memahami isu-isu debat, diharapkan Prabowo Subianto dapat mendominasi dalam debat. Sudirman Said menyatakan komitmen Prabowo Subianto akan terbentuknya pemerintahan yang bersih ke depannya. Kembali terlihat perbedaan pemberitaan Republika, terutama dalam pemilihan narasumber. Republika dapat menghubungi secara langsung pasangan calon presiden Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Sementara BPN, Republika memilih anggota tim sukses nomor urut dua, yaitu Andre Rosiade dan Sudirman Said.

Treatment Recommendation. Bersinggungan dengan penyelenggaraan debat keempat, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyampaikan kepercayaan dan keinginannya sebagai berikut.

“... Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat pendukung capres... agar tidak datang ke lokasi debat di Hotel Shangri-La, Jakarta. “Kita mengharapkan masyarakat ikut serta menciptakan suasana kondusif, ikut berpartisipasi agar kegiatan berlangsung lancar,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komes Argo Yuwono... masyarakat pendukung pasangan calon yang ingin menonton bersama di berbagai wilayah agar tetap menjaga ketertiban (pf. 12).”

Dari pihak kepolisian, Kombes Argo Yuwono meminta masyarakat, khususnya pendukung para pasangan calon, tidak hadir di lokasi debat. Masyarakat diminta turut serta berperan menciptakan suasana yang kondusif agar kegiatan dapat berlangsung lancar. Secara tidak langsung, Polda Metro Jaya melontarkan usulan masyarakat menonton bersama dengan tetap memperhatikan ketertiban.

4.8. Berita Utama Surat Kabar Republika 5 April 2019

Pada bulan April 2019, Republika mempublikasikan berita utamanya dengan judul “Kandidat Mantapkan Suara di Pulau Jawa”. Berita utama “Kandidat Mantapkan Suara di Pulau Jawa” melaporkan kegiatan kampanye pasangan calon presiden yang semakin dekat dengan hari pemungutan suara. Berita “Kandidat Mantapkan Suara di Pulau Jawa” terdiri atas dua puluh paragraf dan disertai dengan gambar cukup besar kampanye terbuka pasangan calon presiden nomor urut satu.

Problem Identification. Pada berita utamanya, Republika memluai dengan menerangkan kegiatan yang tengah dilakukan oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut.

“BANYUMAS – Pasangan capres dan cawapres kembali menggelar kampanye terbuka setelah libur sehari memperingati Isra Mi'raj. Kemarin, kampanye para kandidat terkonsentrasi di Pulau Jawa (pf. 1).”

Pada kutipan berita di atas, Republika mewartakan kegiatan para pasangan calon. Setelah libur sehari dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, para pasangan calon presiden kembali menggelar kampanye. Kampanye tiap-tiap pasangan calon terkonsentrasi di Pulau Jawa mengingat hampir empat puluh delapan persen pemilih nasional berada di Pulau Jawa (KPU RI, 2019).

Causal Interpretation. Lebih lanjut dalam pemberitaan Republika, diberitakan skedul kampanye tiap pasangan calon presiden, terutama pada paragraf kedua dan ketiga.

“Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) langsung tancap gas untuk berkampanye di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes... Ketiga daerah itu... lumbung suara Jokowi saat Pilpres 2014 dengan Raihan suara kisaran 63-65 persen (pf. 2).”

“Sementara wakilnya, KH. Ma'ruf Amin, menyambangi Garut, Jawa Barat, yang merupakan kantong suara capres Prabowo Subianto saat Pilpres lima tahun silam... (pf. 3).”

Calon presiden Joko Widodo memulai kampanye terbukanya di tiga kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banyumas, Tegal, dan Brebes. Pada Pilpres 2014, ketiga daerah tersebut merupakan lumbung suara Joko Widodo. Sedang pendampingnya, KH. Ma'ruf Amin, menggelar kampanye di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

“Prabowo pada kampanye terbukanya ke-12 sejatinya dijadwalkan berkampanye di Kota Pangkal Pinang... Namun batal menghadiri kampanye karena sakit. Adapun pendampingnya, Sandiaga Uno, melakukan kampanye terbuka di Lumajang, Jawa Timur... (pf. 4).”

Calon presiden lainnya, Prabowo Subianto juga melakukan kampanye terbukanya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sayangnya, secara tiba-tiba Prabowo Subianto membatalkan kehadirannya dalam kampanye karena sakit. Sedang Sandiaga Uno tetap melakukan kampanye di Lumajang, Jawa Timur.

Moral Evaluation. Dalam meliput kegiatan kampanye dari dua pasang calon, Republika menarik pernyataan dari para calon

presiden dan wakil presiden. Meskipun dalam liputannya juga menarik pernyataan dari tim sukses salah satu calon presiden. Pernyataan-pernyataan yang ditarik Republika adalah sebagai berikut.

“Pada Pilpres 2014, kata Jokowi, ia meraih 64 persen suara. “Tapi 2019, kita ingin menang 80 persen, setuju ya... Saya sampaikan minimal 80 persen,” kata Jokowi dalam orasi politiknya (pf. 6).”

“Jokowi kemudian mengingatkan pendukungnya untuk menjaga suara... Salah satu caranya dengan mencegah penyebaran hoaks di lingkungan pendukungnya (pf. 7).”

“... Isu di bawah kalua Jokowi menang pendidikan agama bakal dihapus, perkawinan sejenis bakal diledakkan, fitnah itu... (pf. 8).”

Dalam kampanyenya, Joko Widodo ingin kemenangan yang cukup besar. Menurutnya, disbanding dengan Pilpres 2014, pada Pilpres 2019 minimal memperoleh kemenangan persentase delapan puluh persen. Joko Widodo mengingatkan pendukungnya agar dapat menjaga suara selama Pemilu. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan mencegah penyebaran berita bohong. Masyarakat mahfum Joko Widodo diterpa isu miring, seperti pendidikan agama Islam dihapus, pelegalan pernikahan sesama jenis, dan lain sebagainya.

“Melihat tingginya dukungan dari pengurus pesantren dan kiai, Ma'ruf optimistis mampu merebut suara Prabowo. Yang dulu kalah... Menanglah minimal 60 persen,” katanya (pf. 12).”

KH. Ma'ruf Amin dalam kampanyenya menyatakan kemampuannya dapat memenangkan Pilpres 2019. Menurut KH. Ma'ruf Amin, dengan tingginya dukungan pondok pesantren dan kiai, dapat merebut suara dari calon presiden Prabowo Subianto. KH. Ma'ruf Amin mendorong pemenangan timnya dengan kemenangan minimal enam puluh persen. Seterusnya kampanye pasangan calon presiden nomor urut dua diberitakan sebagai berikut.

“Sementara itu, kampanye terbuka Prabowo di Pangkal Pinang, Babel, tetap dipadati para simpatisan meski tak dihadiri sang capres... (pf. 13).”

“Direktur Komunikasi dan Media... yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menghadiri kampanye tersebut mengutarakan,

Prabowo batal hadir karena mendadak mengalami sakit. Para pendukung kemudian menggelar doa bersama untuk kesembuhan Prabowo (pf. 14).”

Sekalipun Prabowo Subianto tidak dapat menghadiri kampanye di Bangka Belitung, kampanye Prabowo Subianto tetap dihadiri masyarakat. Berdasarkan penuturan Hashim Djojohadikusumo, Direktur Komunikasi dan Media BPN yang juga adik Prabowo Subianto, Prabowo Subianto mendadak sakit. Oleh karena itu, para pendukung diminta oleh Hashim Djojohadikusumo melakukan doa bersama demi kesembuhan Prabowo Subianto.

Di tempat berbeda, Sandiaga Uno dalam menyikapi sakitnya Prabowo Subianto mengakui pernyataan dari Hashim Djojohadikusumo. Akan tetapi, Sandiaga Uno menjawab dengan diplomatis dalam arti berikut.

“Sandiaga Uno menilai kondisi fisik Prabowo sangat prima meski saat ini sedang sakit... Tapi bagi kami, kondisi fisik Pak Prabowo sangatlah prima (pf. 15).”

“... Biasanya, kata dia, penyakit yang kadang muncul adalah flu dan sedikit gangguan tenggorokan karena banyak bicara (pf. 16).”

Sandiaga Uno menyatakan, sakit atau tidak sakit pun Prabowo Subianto, Sandiaga Uno tetap menilai kondisi fisik Prabowo Subianto sangat baik sekali. Sandiaga Uno juga menyatakan, sakit yang kadang dialami Prabowo Subianto hanya dua, yaitu pertama, flu dan kedua, gangguan di tenggorokan. *Framing* dalam agenda setting dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif situasional dan kontesktual (Tamburaka, 2013). Pada pemberitaan di atas, perspektif yang digunakan Republika adalah perspektif situasional. Republika berfokus pada isu tertentu, kampanye calon presiden di Pulau Jawa. Namun, porsi pemberitaan memperlihatkan condong kepada pasangan calon presiden nomor urut satu, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin.

Treatment Recommendation. Dalam berita utama “Kandidat Mantapkan Suara di Pulau Jawa”, Republika tidak memberikan simpulan cukup jelas. Republika hanya menyinggung

kampanye terbuka Sandiaga Uno pada beberapa paragraf terakhirnya.

“Sementara itu, saat berkampanye di Lumajang, Sandiaga tak hanya menyampaikan orasi politik. Ia juga meresmikan Rumah Siap Kerja yang merupakan salah satu program unggulan pasangan nomor urut 02 (pf. 18).”

“Peresmian Rumah Siap Kerja sekaligus memastikan berdirinya wadah penggalian sumber daya manusia di wilayah lainnya di Jatim. Selain di Lumajang, Sandiaga meresmikan Rumah Siap Kerja di Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember (pf. 20).”

Dari paragraf di atas, Harian Republika mengabarkan Sandiaga Uno tidak saja menyampaikan orasi politik dalam kampanyenya di Lumajang, Jawa Timur. Sandiaga Uno meresmikan Rumah Siap Kerja. Rumah Siap Kerja merupakan salah satu program unggulan pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. Di Jawa Timur sendiri, Rumah Siap Kerja terdapat di empat daerah, yaitu Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, dan Jember.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum, dengan berkaca pada sesuatu yang dilakukan oleh Erick Thohir selaku pemilik surat kabar Republika pada Pilpres 2019 menunjukkan dengan ikut sertanya pemilik media dalam politik praktis, maka sangat mempengaruhi independensi media massa dalam membuat satu pemberitaan. Meskipun media massa mempunyai sifat sekadar melaporkan suatu peristiwa, kenyataannya media massa turut serta memperhitungkan simbol politik.

Dalam banyak pemberitaan Republika misalnya, Republika dalam menetapkan sumber berita kerap tidak proporsional. Kepada pasangan calon presiden nomor urut satu, Republika selalu melakukan pengutipan langsung kepada calon presiden nomor urut satu Joko Widodo dan wakil presiden KH. Ma'ruf Amin. Sementara kepada pasangan calon presiden nomor urut dua, Republika

hanya mengutip pernyataan dari anggota tim pemenangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Dalam melakukan pembingkai berita, dengan memanfaatkan keterbatasan kolom dan halaman, media massa menyoroti hal-hal penting kemudian menyederhanakannya dengan framing fakta-fakta sehingga nantinya layak diterbitkan kepada khalayak ramai. Di samping dalam beberapa kesempatan, media massa juga memberikan ruang dan tempat cukup luas terhadap aktivitas seseorang atau pasangan calon, seperti menaruh pemberitaan salah satu pasangan calon pada halaman pertama surat kabar.

Ke depannya, media massa diharapkan mampu mengambil sikap tegas terhadap pemilik media. Dalam momentum Pemilu, media massa sepatutnya dapat bersikap objektif. Pengalaman Pilpres 2014 semestinya dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk media massa di Indonesia. Media massa tidak hanya mentaati kode etik jurnalistik, tetapi memerhatikan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kepada masyarakat, juga diharapkan agar mampu bersikap kritis dalam menginterpretasikan isi pemberitaan dari media massa. Masyarakat tidak sekadar membaca, menonton, ataupun mendengarkan pemberitaan dari media massa, tetapi menganalisa lebih dalam isi pemberitaan tersebut.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Cangara, H. (2016). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Eriyanto. (2015). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Morissan, Wardhani, A. C., & Umarella, F. H. (2017). *Teori Komunikasi Massa*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pawito. (2015). *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Saori, D. & Komariah A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tamburaka, A. (2013). *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Acuan artikel dalam buku:

- Al-Khraisha, L., Elqabbany, M., Asfour, Z., Chahine, N., & Nasreddin, M. A. (2019). *The World's 500 Most Influential Muslims 2019*. Amman: The Royal Islamic Strategic Studies Centre.

Acuan artikel dalam jurnal:

- Gazali, E. (2004). Interaksi Politik dan Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 53-74.
- Slamet, A. (2016). Media dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* (6)1, 119-126.
- Tabroni. (2012). Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi* (10)2, 105-116.
- Trijayanto, D. (2015). Relationship in Public Opinion and Mass Media: Formation of Public through Political Advertising in MNC and Metro TV. *Jurnal Promedia* (1)2, 21-37.

Acuan dari surat kabar:

- Capres Siap Hadapi Debat. (2019, 30 Maret). *Republika*, h. 1.
- Doa untuk Ustaz Arifin Ilham. (2019, 10 Januari). *Republika*, h. 1 & 9.
- Ikrar Damai. (2018, 24 September). *Republika*, h. 1.
- Indonesia Sumbang Muslim Berpengaruh. (2018, 20 Oktober) *Republika*, h. 1.
- Jokowi Cerita Kinerja, Prabowo Swasembada. (2019, 17 Februari). *Republika*, h. 1.
- Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial. (2018, 8 September). *Republika*, h. 1 & 9.
- Kampanye Dimulai. (2018, 23 September). *Republika*, h. 1.
- Kandidat Mantapkan Suara di Pulau Jawa. (2019, 5 April 2019). *Republika*, h. 1.

Acuan artikel dalam website:

- Heryanto, G. G. (2018). *Basis Kekuatan Tim Pemenangan*. Diakses pada 3 Februari 2020, dari <https://m.mediaindonesia.com/kolom-pakar/183636/basis-kekuatan-tim-pemenangan>.

Acuan lainnya:

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). Keputusan KPU Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019. Jakarta: Sekretariat Jenderal KPU RI.
- Pemerintah Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2002). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.